

**PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM
PENCEGAHAN AKSI GENG MOTOR DI KECAMATAN
RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan**

Disusun dan Diusulkan Oleh

Ilham

Nomor Stambuk : 105 64 575 09



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2015

**PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENCEGAHAN AKSI
GENG MOTOR DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan Diusulkan Oleh

ILHAM

STAMBUK 1056457509

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Dalam Pencegahan Aksi Geng Motor
Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : ILHAM

Nomor Stambuk : 1056457509

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I



Abdul Kadir Adys, S.H., MM

Pembimbing II



Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui

Dekan Fisipol

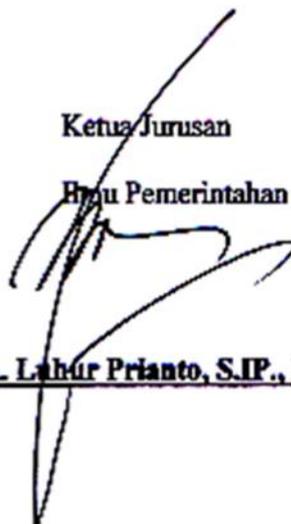
Universitas Makassar



Dr. H. Mahlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



A. Lahur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor : 1434/FSP/A.1-VIII/VI/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di Makassar pada hari Selasa 30 Agustus 2016.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

Sekretaris

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si.

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.



2. Abdul Kadir Adys, S.H., MM



3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si



4. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham

Nim : 1056457509

Jurusan/Fakultas : Ilmu Pemerintahan/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Dalam Pencegahan Aksi Geng Motor Di
Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan karya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau peikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiblanan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Makassar, November 2015

Yang membuat pernyataan,

ILHAM
NIM. 1056457509

ABSTRAK

ILHAM. Peran Pemerintah Kota dalam Pencegahan Aksi Geng Motor di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

(Dibimbing oleh Abdul Kadir Adys dan Ansyari Mone).

Geng motor dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan kedalam perilaku menyimpang dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku.yang dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan masyarakat dan pengendara lainnya. Peran pemerintahan kota yang telah diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari geng motor dijalan dilakukan berbagai cara yaitu pemerintah sebagai regulator yang memberlakukan batasan waktu bagi pengendara yang tidak berkepentingan agar kriminalitas geng motor dapat dicegah, pemerintahan sebagai fasilitator yang memberi lapangan kerja kepada geng motor, dan pemerintah sebagai motivator yang memberikan arahan dan motivasi sehingga pelaku tindak kriminalitas geng motor dapat dicegah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang didapat dari data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik dan pernyataan yang diperoleh dari tes wawancara dan adapun dari hasil penelitian yang didapatkan dari peran pemerintah kota makassar kecamatan rappocini bahwa telah diberlakukan aturan-aturan pemerintah yang telah terlaksana sesuai aturan yang telah diberlakukan.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah Kota, Pencegahan Aksi Geng Motor*

KATA PENGANTAR

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU

Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga karya ilmiah ini dapat tersusun dalam bentuk skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan yang lazim bagi seorang mahasiswa yang telah megakhiri pendidikan formalnya pada suatu lembaga Pendidikan Tinggi, baik negeri maupun swasta yang berkewajiban menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk skripsi.

Tetapi berkat ketabahan dan ketekunan penulis walaupun dalam susah payah pada akhir penyusunan skripsi ini sampailah pada taraf penyelesaian, walaupun disana sisni masih terdapat kekurangan-kekurangan dan ketidak sempurnaan sebagaimana mestinya.

Kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penyajian skripsi ini patut di sadari bahwa kekurangan dan ketidak sempurnaan ilmu pengetahuan pada umumnya dan alumni UNIMUS Khususnya, melaikan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilapan dan kesalahan selaku manusia yang mempunyai kekurangan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bapak sebagai pembimbing I Bapak Abd Adys, SH. MM dan pembimbing II Kepada Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M. Pd.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si
4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Twrkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga peneulis yang membantu penulis berupa Do'a dan materi maupun non materi karena tanpa beliau, penulis bukanlah siapa-siapa karena beliau berdua yaitu ibunda dan ayahanda yang telah berjasa membesarkan saya.
6. Teman-teman Kelad D dan teman-teman yang lain yang sudah membantu penulis sya ucapkan banyak terima kasih karena tanpa teman-teman saya bukanlah orang hebat, semoga bantuan pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi ALLAH SWT, Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Penerimaan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran Pemerintah.....	7
B. Pengertian Pemerintah Daerah.....	9
C. Pengertian Pencegahan.....	15
D. Konsep Geng Motor.....	19
E. Kerangka Pikir.....	26
F. Fokus Penelitian.....	27
G. Deskripsi Fokus.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisa Data.....	31
G. Teknik Pengabsahan Data.....	33

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Karakteristik Objek Penelitian.....	34
B. Luas Wilayah.....	34
C. Kependudukan.....	35
D. Sarana Pendidikan.....	36
E. Sarana Kesehatan.....	37
F. Sarana Peribadatan.....	38
G. Peran Pemerintah Kota Makasssar terhadap Pencegahan Aksi Geng Motor Di Kecamatan Rappocini Kelurahan Guning Sari.....	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Nama-Nama Tabel

1. Tabel 1. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
2. Tabel 2. Ketersediaan Sarana Pendidikan Kelurahan Gunung Sari
3. Tabel 3. Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini
4. Tabel 4. Ketersediaan Sarana Peribadatan di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Geng motor dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena adanya penyimpangan perilaku dari peraturan yang berlaku dan nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna ada jalur baku yang harus ditempuh.

Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, diantaranya karena si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut, adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, apa yang dilakukan melanggar aturan.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya perangkap manusia masa lalu karena dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang terwujud, sebab orang dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang. Masalah sosial perilaku menyimpang dalam tulisan tentang "Geng motor Dalam Kehidupan Remaja" bisa melalui pendekatan individu dan pendekatan sistem.

Dalam pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial (sosialisasi). Tentang perilaku disorder di kalangan anak dan remaja

Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Ketidakberhasilan belajar sosial atau kesalahan dalam interaksi dari transaksi sosial tersebut dapat termanifestasikan dalam beberapa hal. Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari - hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu.

Oleh karena itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Salah satu variasi dari teori yang menjelaskan kriminalitas di daerah perkotaan, bahwa ada beberapa tempat di kota mempunyai sifat yang kondusif bagi tindakan kriminal oleh karena lokasi tersebut mempunyai karakteristik tertentu .

Pemerintah kota Makassar sebagai institusi yang berada di kota ini seharusnya menyadaripersoalan krusial ini, tugas pemerintah yang seharusnya memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara diperankan dengan maksimal. Sebenarnya pemerintah kota Makassar sudah melakukan banyak upaya penanggulangan maraknya teryadi kekerasan dari aksi geng motor.

Fokus pada penelitian ini akhirnya mengambii salah satu bentuk aksi kriminalias geng motor yang cukup meresahkan. Perusakan hingga penodongan yang di lakukan adalah *penyakit* masyarakat yang sering menjadi bahan pembicaraan di kota ini. Tak jarang dengan menggunakan senjata tajam yang berujung pada timbulnya korban jiwa.

Apa sebenarnya geng motor ini? Geag motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi sepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah tren hobi yang sama dan beberapa orang.

Pengertian geng motor memang melekat dengan kekerasan, hal ini karena beberapa geng motor belakangan telah berubah dari kumpulan hobi mengendarai motor menjadi hobi menganiaya orang, sehingga hobi melakukan aksi perampokan. Geng motor dalam persepsi masyarakat awam kebanyakan menganggap geng motor dalah kumpulan orang-orang yang bertindak brutal dan membuat kerusakan di talu lintas dan sekitarnya beraksi di waktu malam dan membuat resah masyarakat.

Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kekurangan perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang untuk anak hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat

mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua. Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarga, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain, salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya, sayangnya kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak *broken home* tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya. Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana dan media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif.

Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan ungu. Numun, ajang- ajang lomba balap yang resmi sangat jarang digelar, padahal ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga ajang aktualisasi diri karena sarana aktualisasi diri sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

Dalam peneliruan ini penulis lebih memfokuskan diri di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa di kecamatan ini khususnya di Kelurahan Gunung Sari cukup tinggi intensitas aksi geng motor baik

siang hari maupun di malam hari. Berdasarkan apa yang sudah dikemukakan oleh penulis ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Makassar dalam pencegahan aksi geng motor di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Rappocini, Kelurahan Gunung Sani.

“Peran Pemerintah Kota Dalam Pencegahan Aksi Geng Motor di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana peran pemerintah Kota Makassar dalam menanggulangi aksi geng motor?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Makassar dalam pencegahan aksi geng motor.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, memberikan informasi mengenai peran pemerintah Kota Makassar dalam mencegah aksi kriminalitas geng motor menanggulangi perusakan dalam bentuk perkelahian. Selain itu juga memberikan sedikit gambaran mengenai penyebab penodongan yang kerap terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan klasifikasi ilmu pemerintahan terutama kajian tentang peran pemerintah dalam menangani kasus tertentu.

2. Dan segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peran pemerintah daerah dalam pencegahan aksi kriminalitas geng motor di kota Makassar.
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peran pemerintah kota Makassar dalam pencegahan aksi kriminalitas geng motor dalam bentuk perkelahian antar kelompok yang kerap mengganggu. Terkhusus bagi pemerintah kota Makassar, hasil dan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan aksi geng motor yang sering terjadi di kota Makassar ini pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Pemerintah

Peran pemerintah dibedakan menjadi tiga yaitu, peran sebagai regulator, peran sebagai fasilitator dan peran sebagai motivator (WHO, 2000, dalam utarini, 2002).

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelegara pembangunan (penerbitan peraturan-peraturan dalam kerangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pemberantasan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai

fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayaka.

3. Pemerintah Sebagai Motivator

Penggambaran diatas yang diawali dengan konsepsi pemerintah menjelaskan peran dan posisi masyarakat yang sebetulnya memegang penuh posisi yang telah dimandatkan kepada institusi pemerintahan, yang mana bangunan setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran sosial.

Sosial (*social circle*) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan dan melaksanakan peran sosialnya. Peranan tentunya mengaikain banyak pihak yang terkait pada peran yang dalaksanakan tergantung dari besar tidaknya peran yang diberikan. Seorang polisi tentunya tidak bisa lepas dengan beberapa bagian masyarakat yang lain dalam kasus perusakan, penodongan dan kelompok geng motor tersebut.

Pemerintah setempat serta institusi terkait lainnya lentunya juga memiliki peran penting dan bagian yang berbeda-beda dengan polisi dalam melaksanakan peran. Pemerintah kota pun demikian, dalam melaksanakan perannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan penduduk dan perusakan, penodongan yang dilakukan oleh kelompok geng motor tentunya tidak bisa dilepaskan dengan peran kepolisian, dinas sosial, lambaga peradilan maupun lembaga penyalur aspirasi seperti DPRD itu sendiri

peran juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap kelompok masyarakat setiap individu dituntut untuk menjalankan perannya masing-masing. Kesenambungan sistem sosial tentunya dipengaruhi oleh berjalannya peran-peran dari individu. Mandegnya sistem peran akan sangat berpengaruh pada sistem sosial sebuah masyarakat.

Ketika salah satu sistem peran tidak berjalan maka sistem peran yang lain akan dipengaruhi oleh sistem peran yang tidak berjalan tersebut. Maka tak jarang menimbulkan persoalan sosial dalam masyarakat. Lemahnya peran pemerintah kota dalam menjalankan perannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya akan menimbulkan peran yang tidak seimbang oleh para pelaku kejahatan.

B. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian "otonom" secara bahasa adalah "*berdiri sendiri*" atau dengan "*pemerintahan sendiri*" sementara daerah adalah suatu "*wilayah*" atau "*lingkungan pemerintah*" dengan demikian pengertiannya otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan pengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri.

Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang atau kuasa pada suatu wilayah atau daerah yang diatur dan untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor - faktor yang meliputi kemampuan pelaksana, kemampuan dalam keuangan ketersediaan alat dan bahan

dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat.

pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan keanekaragaman. Otonomi daerah tidak hanya pelaksanaan demokrasi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. Di dalam UUD 1945 antara lain tersurat bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Berangkat dari kebutuhan individu dalam sebuah sistem sosial, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadikan setiap individu untuk mencari cara dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Terkadang ada beberapa diantara pemenuhan kebutuhan yang perlu melibatkan individu yang lain. Selain itu, ada juga dari kebutuhan-kebutuhan yang khusus bersinggungan dengan kebutuhan individu yang lain. Muncullah kemudian sebuah solusi dalam peradaban kehidupan manusia untuk membentuk suatu kelompok yang diakui untuk membantu proses pemenuhan kebutuhan. Persinggungan dalam kebutuhan antar individu dan proses pemenuhannya diharapkan juga mampu menyelesaikan konflik dalam pemenuhan kebutuhan ini.

Masyarakat kemudian menyebutnya Pemerintah. Pemerintah kemudian menjadi gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat pada mulanya, masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, pakaian dan makanan kepada kelompok pemerintah ini.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain, dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial baru tersebut kemudian berlaku untuk menjalankan fungsi kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat tadi. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Pemerintah kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan bekerja sama maupun kegiatan pemenuhan kebutuhan, lalu bagaimana sebuah kelompok kontrol tersebut dibentuk.

Adanya kesepakatan yang kemudian dikenal dengan sebutan kontrak sosial (*social contract*) tersebut kemudian diberikan kekuasaan legal dengan mekanisme beragam seperti yang kita kenal sekarang samisal pemilihan umum yang selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintah.

Kebutuhan terhadap pemerintah pada beberapa kondisi selain untuk membantu kebutuhan juga dijadikan sebagai institusi yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut terhindar dari benturan yang melibatkan anatara individu di dalamnya. Masuknya zaman

moderen semakin menguatkan peran pemerintah untuk tidak hanya menciptakan ketertiban dalam masyarakat membuat peran pemerintah perlahan juga untuk menjadi pelayan masyarakat.

Tetap pada kontrak sosial, pemerintah pada hakekatnya dibentuk oleh masyarakat oleh karena itu sangat tidak pantas bila pemerintah hanya melayani diri sendiri, melainkan juga harus melayani masyarakat sebagai pemberi mandat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya mencapai kemajuan bersama.

Dengan begitu kelahiran pemerintahan membawa pelajaran bahwa kehadirannya merupakan perwujudan kehendak masyarakat yang menyetujui secara bersama tentang kepentingan bersama mereka untuk diatur oleh pemerintah mandataris rakyat, dari situ pemerintahan bisa mencakup mengenai bagaimana sebuah pelayanan masyarakat dikelola dan karena mencakup kepercayaan masyarakat sebagai manusia maka nilai kemanusiaan wajib dimiliki oleh pemerintah

Pelayanan oleh pemerintah tentunya memerlukan cara untuk menyalurkan pelayanan tersebut, karenanya pemerintah juga sepatutnya memahami cara pendekatan kepada masyarakat dalam proses distribusi pelayanan. Psikologi masyarakat pada sebuah wilayah tentunya berbeda dan secara sosiologis pola pergaulan yang dicetak dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas pula dari corak psikis tersebut yang tentunya berangkat dari adat istiadat setempat.

Ada 7 tugas-tugas pokok pemerintahan:

1. Menjamin keamanan negara dan segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai
3. Menjamin menerapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung dan menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti cara mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru , memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Singkatnya tugas-tugas pokok tersebut diringkaskan menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu : Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pandangan yang berbeda dan memasukkan variabel birokrasi yang datang pada masa modern fungsi pemerintahan tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

1. pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. pemerintah memiliki fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan pelaksanaan program pemberdayaan.

Pendekatan dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah karena didasarkan pada pemberian mandat oleh rakyat tadi, maka dalam prosesnya semua harus dimulai dengan pertanyaan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan pertanyaan itu ditujukan kepada masyarakat. Kemudian bila muncul pertanyaan mengenai sebuah masyarakat mampu hidup dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada sebuah institusi yang sengaja dibuat untuk mengatar pola interaksi dalam masyarakat.

Tingkat partisipasi dan kermudaluan dalam pengambilan keputusan memang sangat tergantung pada populasi penduduk dalam sebuah wilayah. Semakin sedikit jumlah penduduk maka semakin cepat pula proses pengambilan keputusan dan semakin mudah pularegulasi dijalankan.

Setidaknya memberikan gambaran bahwa dalam sebuah masyarakat dengan tingkat persoalan yang belum terlalu kompleks setidaknya juga membutuhkan elit atau minimal akan ada elit dalam masyarakat yang muncul dengan sendirinya untuk memimpin kelompok mayoritas dengan elit yang minimal tadi.

C. Pengertian Pencegahan

“pencegahan adalah Tindakan yang dilakukan sebelum terjadi sesuatu hal baik itu yang bersifat positif, maupun negative dan baik itu berupa perkataan maupun perbuatan”. Mencegah lebih baik daripada mengobati “atau” mencegah adalah lebih muda daripada mengobati . Ungkapan ini seharusnya dijadikan sebagai dasar kehidupan, begitu halnya dalam masalah kriminalitas. Dalam pencegahannya diperlukan usaha yang teliti dan motivasi yang besar agar tidak mudah goyah dan lengser

Ada dua tahap dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap kriminalitas, langsung dan tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan memberikan pengamanan fisik terhadap obyek, memperbaiki lingkungan dan menyempurnakan struktur sosial dan memperbaharui hukum yang sudah tidak relevan.

Adapun secara tidak langsung, bisa dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta kesadaran dan tanggung jawab terhadap masalah kejahatan, membuat peraturan dan ancaman, menumbuhkan kesan akan adanya pengawasan dan sebagainya.

Tumbuh dimasyarakat, maka dengan sendiri tingkat pencegahan akan turun. sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya penyelenggaraan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Dalam pandangan sosiologis, pencegahan kejahatan diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis maupun sosial-psikologis. Dari kedua paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya merugikan, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

A. Kejahatan dan Teori-teorinya

Ada beberapa teori yang memandang nilai kejahatan dan yang berbeda. Diantaranya:

1. Teori Teologis

Teori ini menganggap kriminalitas sebagai sebuah perbuatan dosa dan melanggar perintah Tuhan, yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang normal, yang didorong oleh godaan setan atau nafsu.

2. Teori filsafat manusia

Teori ini membagi kehidupan manusia menjadi dua sisi yang bertentangan, namun memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sisi, manusia memiliki pribadi rohani/jiwa sebagai prinsip kesempumaan, yang mendorong terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, sedangkan di sisi yang lain, manusia memiliki jasmani yang prinsipnya selalu berubah, yang mendorong kepada kerusakan dan kejahatan. Pada tahap selanjutnya, jiwa membaur masuk ke dalam lingkungan jasmani dan menjadi salah satu unsur sebagai pengendali. Jika jiwa tidak mampu mengendalikan Jasmani, maka jasmani akan menenggelamkan jiwa, sehingga muncullah perilaku-perilaku yang sifatnya jahat dan asusila.

3. Teori kemauan bebas

Manusia bebas menentukan sikap dan pilihannya, begitulah prinsip dalam teori ini, artinya manusia memang dipengaruhi oleh setan sebagai sebab-musabab kejahatannya, namun kemauan manusia lah sebagai puncak penentu jika secara sadar seseorang ingin berbuat jahat, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya, bahkan Tuhan dan kitab suci sekalipun.

4. Teori fa'al tubuh Dalam

Dalam teori ini, sumber kejahatan dinilai dari ciri-ciri jasmani seseorang, mulai dari bentuk tengkorak kepala, wajah, dahi, hidung, mata, tangan, kaki dan anggota badan lainnya. Artinya, seseorang yang memiliki kelainan pada bentuk tubuhnya dapat mempengaruhi perkembangan pribadinya, hal ini didasari oleh penelitian seorang profesor ilmu kedokteran dan ahli penyakit jiwa sekaligus

seorang antropolog ternama, Cesare Lombroso (1835-1909) yang mencatat adanya ciri khusus kelainan pada jasmani para penjahat.

5. Teori faktor sosial

Teori ini memandang lingkungan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan. Aristoteles (384-322 S.M) dan Thomas Van Aquino (1226-1274) menegaskan, bahwa faktor kemiskinan dan keserakahan mendorong seseorang untuk berbuat jahat dan asusila. Dalam kemiskinan kronis, seseorang tidak mendapatkan jalan keluar dan akhirnya berputus asa, sehingga muncullah tindakan- tindakankejahatan.

6. Teori bio-sosiologis

Teori ini mengkombinasikan antara faktor internal dan eksternal, suatu kejadian muncul tidak hanya berasal dari pengaruh individu seseorang, namun juga didasari oleh faktor sosial disekelilingnya. Namun demikian faktor yang paling berperan dalam penentuan pola-pola kejahatannya.

7. Teori spiritual

Teori ini munitik beratkan agama dan keyakinan sebagai sesuatu yang saling mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki jiwa agama dan keyakinan yang kuat pasti mampu mengendalikan diri dan akan terhindar dan ha-nal jahat, sebab agama berperan sebagai dasar yang menumbuhkan rasa kasih sayang, mengeluarkan dari sifat di egoisme dan melarang dari kejahatan. Sebaiknya, seorang yang jiwa agamanya lemah cenderung terpengaruh dan sangat rentan terhadap hal-hal jahat.

D. Konsep Geng Motor

1. Pengertian Geng Motor

Geng Motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi bersepeda Motor yang berkendara secara bersama-sama baik itu tujuan pribadi atau secara berkelompok (Coleman, 1980). Maka geng motor adalah salah satu dari kelompok pertemanan dari berbagai macam jenis, yang lebih banyak diartikan sebagai kelompok pertemanan yang bersifat negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB1, 2001), Geng atau (Gengstar) berasal dari bahasa Inggris adalah sebuah kelompok penjahat yang terorganisasi secara rapi yang memiliki kebiasaan anti aturan. Dalam konsep yang lebih moderat, geng merupakan sebuah kelompok kaum muda yang pergi secara bersama-sama dan seringkali menyebabkan keributan, sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak.

Saat ini geng motor telah menjadi gejala sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Kehadiran kelompok-kelompok remaja dengan penampilan khasnya itu identik dengan kekerasan. Melalui tayangan televisi kita dapat menyimak mereka menjalankan aksi brutal di jalanan mereka juga digambarkan sebagai kaum remaja yang sering membuat keributan dan sudah dicap negatif oleh kalangan masyarakat umum. Para anggota geng ini sering dikenal dengan sebutan (BEGAL).

Dalam bahasa psikoanalisis Sigmund Freud (1990-1997), kaum remaja itu lebih mengikuti kekuatan id (rongan-dorongan agresif) ketimbang superego.

(hati nurani). Kebendaan ego (keakuan) mereka gagal untuk memediasi agresivitas menjadi aktifitas sosial yang dapat diterima dengan baik dalam kehidupan sosial (sublimasi). Namun, pendekatan psikologis itu sekedar mampu mengungkap isi dalam lingkup individual itu berarti nilai-nilai etis yang berdimensi sosial cenderung untuk dihilangkan, Padahal kehadiran geng motor lebih banyak berkaitan dengan problem sosiologis.

Perasaan khawatir bahwa geng ini akan merebak atau menular layaknya bahaya patologis pun dapat dimengerti. Sebab, apa yang disebut sebagai kenakalan remaja tidak dapat lahir sendiri. Kenakalan atau penyimpangan sosial remaja, yang terlibat dengan bertumbuhnya geng, ditransmisikan dan dipelajari dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Terlebih lagi remaja sangat rentan untuk melakukan tindakan-tindakan peniruan, apalagi terhadap perilaku yang dianggap sebagai mode (fashion) yang menimbulkan berosisme dan rasa bangga.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan secara singkat tentang beberapa kenakalan remaja yang saat-saat ini berkembang biak sebuah masyarakat, terutama bagi kalangan remaja karena sebagaimana remaja memiliki suatu ego yang besar sehingga sulit untuk mengontrol diri dari hal-hal negatif, hal ini disebabkan oleh minimnya penanaman nilai-nilai agama (akhlak) sehingga para remaja tidak memiliki benteng untuk menfilter maupun menghindari hal-hal negatif tersebut. Hal ini diperkuat dengan lingkungan yang serba cuek ataupun bahkan memberikan contoh-contoh negative, sehingga semua hal-hal yang berbau negatif seakan-akan mendapat pupuk ataupun angin segar untuk

berkembang baik. Karena bagaimana pun yang haq dan yang batil itu jelas jadi kita tidak boleh membiarkan yang batil itu berkembang baik.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang terwujud penyimpangan, sebab orang dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang. Masalah sosial perilaku menyimpang dalam tulisan tentang (Geng Motor Dalam Kehidupan Remaja” bisa melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem.

Dalam pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diindikasikan sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial (sosialisasi). Tentang perilaku disorder di kalangan anak dan remaja (Kauffman, 1990 :6) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Salah satu variasi dari teori yang menjelaskan kriminalitas di daerah perkotaan, bahwa beberapa tempat di kota mempunyai sifat yang kondusif bagi tindakan kriminal oleh karena lokasi tersebut mempunyai karakteristik tertentu, misalnya :

(Eitzen, 1990 : 400), mengatakan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam masyarakat kota pada umumnya berda pada bagian wilayah kota miskin, dampak kondisi perumahan di bawah standar, overcrowding, derajat kesalahan rendah dari kondisi serta komposisi penduduk yang tidak stabil.

Ada tiga tipe geng:

- a. geng pencurian (thief gangs), mereka berkelompok melakukan pencurian yang mula-mula hanya untuk menguji keberanian anggota kelompok.
- b. geng konflik (conflict-gangs) kelompok ini suka sekali mengekspresikan dirinya melalui perkelahian berkelompok supaya tampak gagah dan pemberani.
- c. geng pengasingan (retreats gangs), kelompok geng ini sengaja mengasingkan dirinya dengan kegiatan minum minuman keras, atau napza yang kerap dianggap sebagai suatu cara ”pelarian” dari alam nyata.

Tetapi bisa saja sebuah geng memiliki lebih dari satu macam tipe. Dalam geng acapkali tumbuh subkultur kekerasan (subculture of violence). Munculnya subkultur itu disebabkan oleh adanya sekelompok orang yang memiliki sistem nilai yang berbeda dengan kultur dominan. Masing-masing subkultur memiliki nilai dan peraturan berbeda-beda yang kemudian mengatur anggota kelompoknya. Nilai-nilai itu terus berlanjut karena adanya perpindahan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berlatar belakang pengetahuan tentang berbagai jenis geng, kini perlu diteliti secara objektif keberadaan komunitas.

Geng Motor tersebut. Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi bercirikan: punya identitas (nama, ornamen pembeda, lambang, dsb). Kelompok ini identik dengan minuman keras, obat-obatan terlarang (ganja, sabu-sabu, ektasi, etc), freesexs, berkendara, bergerombol, dengan penampilan khasnya yang terlihat urak-urakan; dan memiliki semacam daerah kekuasaan, dan musuh lainnya.

Karakteristik keanggotaan geng motor adalah sebagai berikut:

- a. usia antara 14-32 tahun; kebanyakan berjenis kelamin laki-laki; sangat bangga dengan statusnya sebagai salah satu anggota geng motor; agresif dan menantang bahaya;
- b. Tingkat pendidikan antara SMP sampai dengan SMA dan Non Pendidikan; menjadi anggota geng motor atas ajakan rekan sekolah maupun lingkungan. Apabila geng mereka diekspos di media massa, mereka merasa sangat bangga, sehingga semakin berlomba-lomba untuk lebih banyak melakukan perilaku yang mereka anggap menimbulkan sensasi yang akan dipublikasikan oleh media. Kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal.
- c. Sering menodong, (Merampok) dan merampas milik orang lain, melakukan tindak kekerasan, tawuran antargeng, dan melakukan pembunuhan terhadap anggota geng lain .
- d. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau minum obat-obatan, dan menimbulkan keadaan yang kacau yang mengganggu lingkungan warga.

Karena tujuan utama pendirian kelompok tersebut merupakan upaya (ekspresi) penolakan terhadap banyaknya peraturan-peraturan dalam masyarakat yang banyak membatasi kegiatan (aktivitas) mereka. Menurut hasil analisis kami, hal ini terjadi karena mereka tidak sadar bahwa ada kemungkinan terbuka peluang bagi para penjahat yang menyusup ke dalam geng motor, sehingga masyarakat

menganggap perilaku kriminal tersebut dilakukan oleh para remaja yang sebenarnya tidak berniat untuk melakukan tindak kriminal.

Penyusupan tersebut sulit untuk diidentifikasi, karena jumlah geng motor di kota-kota sangat banyak. Dan ketika melakukan operasi, mereka menggunakan penutup yang menutupi seluruh wajah. Jadi sulit sekali mengidentifikasi pelaku. Inilah yang membuat polisi melakukan tindakan represif dan mempromosikan tindakan tembak di tempat untuk para pelaku kekerasan dari geng motor. Namun demikian, polisi harus berhati-hati menumpas perilaku kriminal tersebut, sehingga masyarakat tidak resah, terutama bagi para orang tua yang kebetulan anak remajanya terlibat dalam aksi geng motor tersebut.

Polisi harus benar-benar bekerja keras untuk menyisir mana remaja yang delinquent dan mana para kriminal yang berkedok geng motor ataupun juga provokator. Membubarkan atau melarang tumbuhnya aksi geng motor bukan merupakan jalan keluar yang baik, bahkan akan jadi bumerang bagi penegakan hukum. Karena akan melahirkan masalah sosial yang baru; remaja akan kehilangan ruang publik untuk berekspresi diri, dan mencari kegiatan lain yang boleh jadi lebih patologis wujudnya, misalnya kebut-kebutan di jalan.

Faktor Kenakalan Remaja Berdasarkan perkembangan zaman saat ini adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab kenakalan remaja saat ini adalah :

1. Faktor intern adalah faktor yang datangnya dari dalam tubuh remaja sendiri. Faktor intern ini jika mendapatkan contoh-contoh yang kurang mendidik dari tayangan televisi akan menimbulkan niat remaja untuk meniru adegan-adegan yang disaksikan pada isi program televisi tersebut.

Khususnya menyangkut masalah pergaulan remaja di zaman sekarang yang makin berani mengedepankan nilai-nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan adat budaya bangsa. Akhirnya keinginan meniru tersebut dilakukan hanya sekedar rasa iseng untuk mencari sensasi dalam lingkungan pergaulan dimana mereka bergaul tanpa batas dan norma agar dipandang oleh teman-temannya dan masyarakat sebagai remaja yang gaul dan tidak ketinggalan zaman.

2. Faktor ekstern Faktor ekstern adalah faktor yang datangnya dari luar tubuh remaja. Faktor ini dapat disebut sebagai faktor lingkungan yang memberikan contoh atau teladan negatif serta didukung pula oleh lingkungan yang memberikan kesempatan. Pengendalian Dalam literatur sosiologi (Paul B Horton dan Chester L Hunt, 1964: 140-146, dan Alex Thio, 1989: 176-182).

Ada dua cara yang dapat dikerahkan untuk mengatasi deviasi sosial.yaitu:

1. Internalisasi atau penanaman nilai-nilai sosial melalui kelompok informal atau formal.Lembaga-lembaga sosial, seperti keluarga dan sekolah, adalah kekuatan yang dapat membatasi meluasnya geng motor.Mekanisme pengendalian itu lazim disebut sebagai sosialisasi. Dalam proses sosialisasi itu, setiap unit keluarga dan sekolah memiliki tanggung jawab membentuk, menanamkan, dan mengorientasikan harapan-harapan, kebiasaan-kebiasaan, serta tradisi-tradisi yang berisi norma-norma sosial kepada remaja.

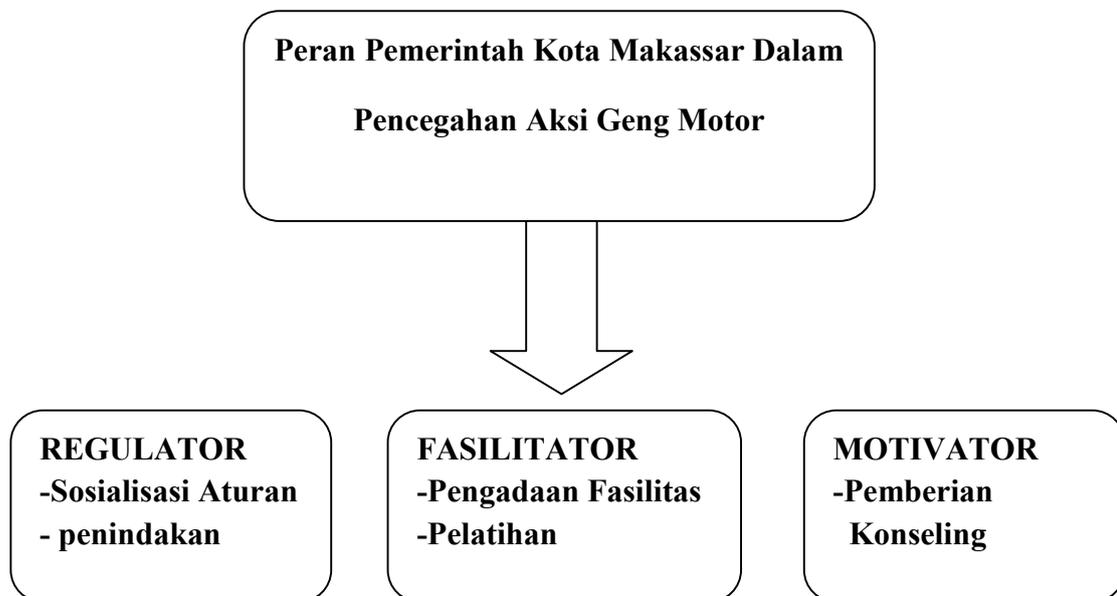
2. Penanaman Nilai-nilai Agama Sebagai upaya preventif terhadap peningkatan jumlah anggota geng motor di kemudian hari, perlu dilakukan penanaman nilai-nilai agama sejak dini. terutama tentang akhlaq (moral dan etika).

E. Kerangka Pikir

Dalam persiapan penelitian ini, peneliti akan memulai dengan mencari informasi dari para ahli, serta masyarakat mengenai penyebab perkelahian antar kelompok geng motor itu terjadi, kemudian mencari informasi dari pemerintah kota Makassar.

Banyaknya aksi kriminalitas geng motor yang dekat pada persoalan, sehingga penelitian juga menyentuh semua institusi seperti kepolisian dalam hal ini "POLRESTABES/RESKRIM" makassar dan pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Makassar untuk menggali tentang peran apa saja yang telah dilakukan. Kemudian membandingkan dan menganalisa apakah upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah kota itu sudah serah dengan faktor-faktor yang menyebabkan perkelahian anak kelompok geng-geng motor itu terjadi. Selain itu rencana penelitian ini juga berupaya mencari solusi tepat dari faktor-faktor yang telah didapatkan. Dari uraian diatas digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

**Peran Pemerintah Daerah Dalam pencegahan Aksi Geng Motor
di Kota Makassar**



Gambar 1. Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Bagaimana Peran Pemerintah Kota Dalam Pencegahan Aksi Geng Motor Di Kota Makassar.

G. Deskripsi Fokus

1. Peran pemerintah sebagai regulator yang dimaksud dalam skripsi ini adalah penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas geng motor.
 - a. Sosialisasi aturan adalah menyampaikan kepada publik aturan hukum yang menyangkut dengan aktivitas geng motor.
 - b. Penindakan adanya tindakan hukum yang dikenakan terhadap aktivitas geng motor.

2. Peran pemerintah sebagai fasilitator yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran pemerintah untuk mengadakan berbagai fasilitas sehingga dapat mengurangi aktifitas dari geng motor.
3. Peran pemerintah sebagai motivator adalah memberi bimbingan atau arahan untuk tidak melakukan atau menghindari aktivitas dari geng motor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah satu bulan lebih, terhitung mulai bulan september sampai dengan bulan oktober 2015. Lokasi penelitian adalah Daerah Kota Makassar. Alasan memilih lokasi karena pada lokasi tersebut sering terjadi gangguan dari sekelompok geng motor yang membuat masyarakat kota Makassar menjadi terganggu karna dampak dari geng motor tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan yang diperoleh dari daftar melalui tes wawancara.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian adalah tipe penelitian deskriptif analisis yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki, di mana hasil eksplorasi merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail secara sistematis.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

NO	NAMA	JUMLAH
1.	Kesbang Kota Makassar	1
2.	Dinsos	1
3.	Lurah Gunung Sari	1
4.	Polsek Rappocini	2
5.	Pelaku Geng Motor	2
6.	Korban	1
	Jumlah	8

D. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan tehnik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan melalui informasi kunci.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, laporan tahunan atau data statistik bulanan yang terkait meliputi Bupati Bantaeng, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik ini pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban. Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan.

2. Observasi

Dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui Wawancara, artinya pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui kepastian antara data yang diperoleh melalui wawancara dan formulir isian dengan fakta pelaksanaan di lapangan.

3. Studi Pustaka dan Dokumen

Cara pengumpulan data yang dilakukan berhubungan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan tulisan yang pernah ada tentang perempuan dan politik.

F. Teknik Analisis data

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung (Miles & Huberman, 1992). Analisa data dilakukan melalui tiga alur, yakni:

1. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian data dari catatan lapangan (*field note*). Proses ini berlangsung sepanjang penelitian yang dilakukan sekitar sebulan, dimulai dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian ini selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, sampai kesimpulan akhir didapatkan.

2. Sajian data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis mencoba lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau pun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya tentunya akan banyak membantu. Sajian data meliputi deskripsi, matriks, gambar/skema, dan tabel yang diperoleh dari berbagai instansi dimana penelitian ini berlangsung. Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara sistematis supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-

pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

G. Teknik Pegabsahan Data

Validas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pada waktu yang berbeda.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber lain yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna adata yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuraan.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu yang dilakukan disini dengan menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik objek penelitian

1. Keadaan geografis

Kelurahan Gunung Sari merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan Rappocini Kota Makassar. Kelurahan ini merupakan salah satu wilayah kelurahan di bagian selatan kota Makassar. Wilayah ini memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Banta-bantaeng.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karunrang dan Kabupaten Gowa.

Kelurahan Gunung Sari berada pada ketinggian <500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari daratan rendah. Secara administratif, Kelurahan Gunung Sari terdiri dari 26 RW dan 141 RT. Kelurahan Gunung Sari memiliki jarak kurang lebih 1 km dari pusat pemerintahan kecamatan dan kurang lebih 10 km dari pusat pemerintahan kota.

2. Luas wilayah

Kelurahan Gunung Sari memiliki luas wilayah keseluruhan yaitu 54,80Ha. Penggunaan lahan yaitu sekitar 150 m² diperuntukkan untuk perkantoran, 1 km² diperuntukkan untuk pekuburan dan sisanya untuk pemukiman.

penduduk. Seperti halnya dengan wilayah-wilayah lain dalam Kota Makassar, wilayah 28 kelurahan Gunung Sari juga cukup padat oleh sebab itu diperlukan adanya upaya-upaya dari berbagai pihak untuk lebih memperhatikan kondisi tata ruang kota dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

3. Kependudukan

Faktor kependudukan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau penduduk sudah menjadi suatu keharusan agar dapat bersaing dalam dunia globalisasi sekarang ini. Adapun gambaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini sebagai berikut :

Tabel 3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Gunung San Kec.Rappocini Kota Makasar.

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa	Persentase
1	Laki-laki	2983	43,52
2	Perempuan	3871	56,48
Jumlah		6854	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015.

Pada tabel di atas terlihat bahwa komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini kota Makassar yaitu sebagian besar adalah perempuan sebanyak 3.871 Jiwa atau 56.48% dan untuk laki-laki sebanyak 2.983 jiwa atau 43 52%.

4. Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan di kelurahan gunung Sari kecamatan Rappocim kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Ketersediaan Sarana Pendidikan dikelurahan Gunung San kecamatan Rappocini kota Makassar.

No	Sarana pendidikan	Jumlah (unit)	Persentase
1	Taman kanak-kanak	4	21,05
2	SD	4	21,05
3	SMP	5	26,32
	SMA	4	21,05
	Perguruan Tinggi	2	10,53
	Jumlah	19	100

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di kelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocinu kota Makassar sudah memiliki sarana pendidikan yang lengkap dan Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi sehingga kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan dapat terpenuhi dengan baik.

5. Sarana Kesehatan

Sarana yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Tabel 5 Sarana Kesehatan di Kelurahan Gunung San Kecamatan Rappocini
Kota Makassar

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (unit)	Presentase
1	Puskesmas	2	4,88
2	Apotik	11	26,83
3	Posyandu	26	63,41
4	Tempat Dokter Praktek	2	4,88
Jumlah		41	100

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang terdapat dikelurahan Gunung Sari kecamatan Rappocini kota Makassar terdiri dari puskesmas, apotik, posyandu dan tempat dokter praktek. Jumlah sarana kesehatan terbanyak yaitu posyandu sebanyak 26 unit atau 63.41%. Hal ini dapat disimpulkan dengan sarana kesehatan sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatannya.

6. Sarana Peribadatan

Selain sarana pendidikan dan sarana kesehatan, sarana yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah sarana peribadatan. Sarana peribadatan ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan ibadah masyarakat. Ketersediaan sarana peribadatan umum merupakan hasil karya atau swadaya masyarakat sendiri dalam membangun sarana ibadah seperti mesjid, atau sarana ibadah lainnya.

Tabc16 Sarana Peribadatan di Kelurahan Gunung San Kecamatan Rappoceni
Kota Makassar

No	Sarana peribadatan	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	24	92,31
2	Musallah	2	7,69
	Jumlah	26	100

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa Jenis sarana peribadatan yang terdapat dikelurahan kecamatan Gunung Sari Rappocini Kota Makassar terdin dari masjid dan musholla sebanyak 26 unit. Mesjid merupakan sarana peribadatan yang paling banyak yaitu ukuran 24 unit atau 92,31% sementara hanya ada 1 unit musholla. Hal ini dapat disimpulkan sebagian besar penduduk yang ada di kelurahan Gunung Sari kccamatan Rappocini kota Makassar merupakan muslim.

B. Peran Pemerintah Kota Makassar terhadap Peneegahan Aksi Geng Motor Di Kota Makassar Kelurahan Gunung Sari

Peran Pemerintah kota Makassar dalam situs resminya menyatakan bahwa Aksi Geng Motor merupakan salah satu tantangan terbesar dan memang selalu menarik perhatian masyarakat maupun dalam instansi pemerintah kota. Dalam analisa peneliti, di karenakan aksi dari geng motor tersebut sangat membuat masyarakat menjadi takut resah, karna sering teriadi gangguan-gangguan dari sekelompok geng motor (begal). Ketika sebuah aksi geng motor hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika aksi dari geng motor ini dalam sebuah wilayah terjadi berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan yang berkuasa di wilayah tersebut barulah aksi dari mereka mendapatkan perhatian.

Kembali diulangi, pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan itermal masyarakat. Aksi geng motor dalam faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa diakibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri. Adanya faktor luar yang bisa memicu aksi mereka itu terjadi. Bila dilihat dari pola kemiskinan yang mendera di kota Makassar, peran pemerintah tentunya tidak lepas dari situ. Mendistribusikan kekayaan secara adil adalah bagian tugas dari pemerintah beberapa wadah pemanusiaan diri tidak dapat diraih karena keterbatasan ekonomi seperti sekolah, bahkan untuk beribadah karena waktu lelah habis digunakan untuk mamenuhi kebutuhan hidup. Pada tahun 2015 dari data

dinas sosial kota Makassar menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kecamatan Rappocini sebagai kawasan pusat perbelanjaan modern ternyata menjadi wilayah dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi, 8233 KK di kecamatan ini tercatat sebagai keluarga fakir miskin. Arhasil anak terlantar yang biasa menjadi bingk kerok kejahatan melebihi angka 1000 anak. Untuk melengkapi argumen penulis berikut kami cukupkan dengan pernyataan Camat Rappocini kota Makassar.

Pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya. Namun yang tampak Jelas pada beberapa kecamatan dengan rasio peningkatan jumlah penduduk yang tinggi ternyata diikuti dengan jumlah penduduk miskin ketika pembangunan infrastuktur modern begitu cepat memenuhi wilayah tersebut.

Istilah *to caddi* bagi masyarakat miskin keluar sebagai bentuk penerimaan nasib yang mereka alami Mereka pun mengakui pengusaha, pemilik modal, pejabat pemerintah sebagai orang besar yang sangat sedikit sekali jumlahnya bila dibandingkan dengan keluarga miskin yang tersebar di 14 kecamatan kota makassar.

Pemerintah semestinya memiliki program untuk menangani tindak kejahatan yang tenadi termasuk aksi geng motor yang merebak di masyarakat kota Makassar. Apa yang teradi di kota Jakarta dan kota besar lain yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi setidaknya menjadi contoh bagi pemerintah kita untuk segera mengambil tindakan hukum walaupun setidaknya ada upaya untuk mencegah potensi-potensi yang bisa berubah di kemudian hari menjadi kegaduhan dalam aksi kriminalitas sosial dalam masyarakat.

Pada bagian ini penulis membagi peran pemerintah dalam tiga bagian apa yang tertera pada bab II bahwa batasan pemerintah menurut pemerintahan representasi yudikasi di negeri ini meningkat aksi dari motor sangat sulit untuk diadili karena banyak jumlah orang yang terlibat. Oleh karena itu penulis menggantikan perannya tersebut dengan memasukkan kepolisian kota yakni POLRESTABES/RESKRIM dalam upayanya menangani tindakan dari aksi geng motor tersebut namun tidak penjabaran mengenai perannya dimasukkan dalam pembahasan tiga bagian pemerintah dalam skala tadi. Selain itu penulis juga menemukan adanya jalinan kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak kepolisian untuk bahu membahu menangani kasus geng motor ini.

Lembaga pemerintah di bawah naungan PEMKOT Makassar ini lebih mengutamakan pola penyampaian konsep masyarakat damai kepada berbagai elemen serta bersifat investigatif terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Selain itu, program juga dikhususkan pada beberapa wilayah yang memang dekat dengan siklus dan aksi gang motor ini.

Namun selain dari program pelatihan dan sosialisasi, KESBANG juga diadakan kerjasama dengan beberapa pihak untuk mewaspadaai terjadinya tindakan dari aksi geng motor sebelum konflik itu terjadi, oleh karena itu tindakan KESBANG bersama lembaga kepolisian (POLRESTABES), TNI (Kodam VII Wirabuana) dan badan intelijen bahu membahu mengupayakan cara penanganan kasus dari aksi gang motor ini dan walaupun pihak KESBANG sama sekali tidak memberi kategorisasi mengenai program yang dilaksanakan, namun penulis mencoba memberi kategorisasi peran pemerintah terhadap aksi pencegahan geng

motor dari segi waktu pelaksanaan yang diatur dari kejadian sebuah kasus. Berikut kategorisasinya yang terbagi atas dua upaya preventif dan investigasi :

Penulis menyebutnya dengan istilah preventif karena program yang akan dijabarkan berikut bersifat mendahului sebelum terjadi sebuah aksi dari geng motor. Selain itu, pada kategori program ini dimasukkan pula beberapa program dari upaya preventif untuk menjaga aksi mereka tidak terjadi lagi :

1. Peran pemerintah selaku Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan).

a. Sosialisasi aturan

Kegiatan ini dilakukan saat turunnya sebuah bentuk keputusan dalam bentuk regulasi hukum yang diatur dan bersinggungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi pencegahan geng motor ini jelas terkait di dalamnya, Contoh salah satu sosialisasi perundang-undangan yang diadakan oleh kanto KESBANG ialah sosialisasi UU tata cara penyampaian pendapat di depan umum. kancangnya upaya ini dilakukan di setiap wilayah kecamatan, ternama di Kota Makassar setelah mendapati tingginya angka kriminalitas gang motor yang terjadi di kota makassar.

"Semoga dengan adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah kota Makassar kami dari pihak kepolisian bisa lebih serius menjalankan tugas yang diberikan kepada kami (Reskrim)" (hasil wawancara antara para peneliti dan imforman dalam hal ini bapak TS pada tanggal 10 november 2015).

Dari sini, peneliti kemudian menganalisa mengenai peran apa yang seharusnya diperankan oleh PEMKOT Makassar dengan berbagai instansi yang dimiliki. KESBANG dan Dinas Sosial memang dibentuk untuk menghilangkan semua persoalan sosial namun pada dasarnya peneliti menemukan banyak dari beberapa program yang belum maksimal dan serius untuk benar-benar menyelesaikan persoalan aksi kriminalitas gang motor ini.

Untuk kegiatan seminar dan sosialisasi regulasi yang diadakan oleh Camat Rappocini misalnya cenderung hanya akan dapat dicerna oleh kalangan berpendidikan atau setidaknya pernah mengenyam sekolah formal. Namun bagi masyarakat ekonomi tingkat bawah tentunya kegiatan ini hanyalah kegiatan buang waktu dan lebih memilih untuk mencari cara bagaimana menghidupi keluarga untuk bertahan hidup pada hari itu. Regulasi bagi mereka adalah hal sia-sia ketimbang isi perut dan anaknya yang menangis meminta susu.

seharusnya pemerintah yang mengaplikasikan itu dalam tindakan nyata mengurangi tindak kejahatan kelompok bukan dengan memberi sosialisasi regulasi. Kebutuhan masyarakat miskin hanyalah penghidupan yang layak dan hanya bisa dipenuhi oleh pemerintah sebagai pengatur agar kiranya penghidupan yang layak itu bisa terbagi secara merata.

Mengenai pembinaan teknis resolusi konflik oleh Camat Rappocini, dari paparan beberapa kondisi forum sehari tersebut hanya bersifat menolong alias satu arah para tokoh masyarakat yang dilibatkan sangat diberi peluang untuk mengeluarkan pendapat mengenai penyelesaian kriminalitas gang motor. Kegiatan

seperti itu berguna, namun akan lebih baik bila kesempatan bicara lebih banyak dimiliki oleh mereka yang biasa terlibat langsung dalam penyelesaian kasus ini.

Program pemerintah kota memang cenderung menganggap bahwa masyarakat kecil tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri, padahal faktanya para tokoh masyarakatlah yang lebih sering turun langsung dalam proses resolusi kejadian ketika terjadi di areal pemukimannya. Hingga akhirnya kesempatan bicara pun akan dikurangi seiring pandangan yang terbangun bahwa pemerintahlah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut

"Bukti yang minimnya perhatian pemerintah terhadap wilayah yang rawan ditunjukkan dengan jumlah kunjungan yang sangat minim". (Hasil wawancara antara peneliti dan informan Bapak Lurah Gunung Sari Pada tanggal 10 november 2015).

"Kami selaku jajaran pemerintah sangat mendukung sepenuhnya adanya aturan yang dikeluarkan oleh wali kota makassar sebagai tujuan agar kiranya Makassar aman, tenang dan damai di mata masyarakat". (hasil wawancara antara peneliti dan imforman dalam hal ini staf dinsos dalam hal ini AR pada tanggal 10 november 2015).

Penulis mempertanyakan kepada beberapa warga di kecamatan Rappocini bahwa pemerintah kota sama sekali tidak pernah datang ke tempatnya kecuali bila perhelatan politik berlangsung seperti pemiluakada atau pemilihan legislatif. Itupun diakui oleh Bapak lurah Gunung Sari yang hanya memiliki dua kali reses di kecamatan tersebut.

Setelah memenuhi salah satu tokoh masyarakat di keluarahan Gunung Sari kecamatan Rappocini yang biasa turun langsung untuk meredakan kasus geng motor ini yang terjadi sekitar pemukimannya. Peneliti mendapati peran besar beliau yang biasa dipanggil Pak Ode ini untuk meredamkan aksi kriminalitas geng motor ini yang biasa terjadi ialah satu yang menurut peneliti kurang diperhatikan oleh PEMKOT adalah perhatian kepada mereka para tokoh masyarakat atau mereka para pejabat pemerintahan tingkatan rukun kampung (RK), rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT).

Adanya sikap yang cenderung lamban dalam mengambil tindakan juga menjadi salah satu kekurangan pemerintah. Tindakan pembiaran terhadap aksi geng motor ini dalam analisa penulis dianggap sebagai bentuk tindakan pula bagi pemerintah. Padahal bagi masyarakat dalam sebuah pemerintahan yang diakui tentunya akan mengharapkan tindakan nyata dari mereka yang telah mendapatkan mandat mengemban amanah rakyat termasuk menjamin keamanan dan kondusifitas sebuah pemukiman. Sikap lamban itu akhirnya berbuah pada pengambilan keputusan sendiri oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya.

Dari beberapa uraian diatas maka peneliti dapat melakukan wawancara salah satu informan dalam hal ini kapala kesatuan bangsa makassar terkait dengan jalinan kerja sama dalam sosialisasi regulasi terhadap aparat ke polisian diantaranya adalah sebagai berikut :

"Dalam upaya pencegahan aksi kriminalitas geng motor maka tentu kami selaku pemerintah kota makassar harus punya persiapan dan pengebalan hukum dalam mewaspadaai aksi kriminalitas yang sering dilakukan para kolompok geng-geng motor, diantaranya adalah dengan melakukan sosialisai sesuai dengan aparat ke polisian dalam hal ini kambtimnas" (hasil wawancara panneliti dengan Sekertaris lurah gunung sari dalam hal ini bapak YN pada tanggal 10 november 2015).

"Sebagai pemerintah Kelurahan Gunung Sari sangat mengharapkan ada tindakan nyata dari pihak aparat ke polisian dalam pengawasan tiap-tiap daerah berdasarkan regulasi yang sedang berlaku." (hasil wawancara antara peneliti dan imforman dalam hal ini bapak RP kesatuan bangsa (kesban) pada tanggal 10 november 2015).

Dengan demikian berdasarkan hasil pertemuan antara peneliti dan kepala kesatuan bangsa (kesban) menjabarkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan upaya pemahaman kepada masyarakat. Sementara bentuk kegiatan sosialisasi regulasi ini menyiapkan seminar dengan menghadirkan peserta sesuai dengan keterkaitan jenis regulasi yang disosialisasikan. Beberapa organ maupun yang bersifat personal pernah ikut dalam proses sosialisasi ini diantaranya ormas keagamaan, lembaga mahasiswa, pejabat pemerintahan hingga tingkat rendah rw, rt ataupun masyarakat yang di undang menghadiri acara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat melakukan wawancara dengan imforman dalam hal ini salah satu pelaku gang motor dan korban geng motor yang dapat peneliti temui di salah satu tempat berkumpulnya yang berada di kulurahan Gunung sari, Kecamatan rappocini

"Sebenarnya saya tidak setuju dengan peraturan pemerintah, karena saya melihat pemerintah dan orang-orang disekitar yang bekerja menilai kami orang-orang yang tak punya bahkan dianggap remeh" (hasil wawancara antara peneliti dan imforman KK yang saya temui disalah satu tempat bergaulnya pada tanggal 10 november 2015).

"saya selaku korban dari geng motor sangat mendukung dengan adanya aturan yang di keluarkan dari pemerintah agar kiranya aksi kriminalitas geng motor tidak mengganggu lagi bagi orang yang sedang beraktivitas." (hasil wawancara antara peneliti dan salah satu hal dalam hal ini pegawai alfa mart AT pada tanggal 10 november 2015).

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan berbagai imforman maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya sosialisai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar maka dengan demikian aksi geng motor yang sering kali terjadi di setiap daerah dapat diatasi secara perlahan.

b. Penindakan

Penindakan terhadap para anggota geng motor di makassar menghiasi media massa cetak dan elektronik. Berita itu menggembirakan masyarakat yang sudah lama menantikan penindakan nyata, bukan basa-basi. Setitik harapan muncul , bak gayung bersambut, kepolisian di daerah lain pun mengikuti koleganya di berbagai daerah tersebut. Di Makassar, sekan tak mau kalah, ancaman tembak di tempat ditebar. Geng motor telah menjadi akronim yang berkonotasi kekerasan dan kejahatan. Sejatinya bukan geng motornya yang seharusnya diburu. Tetapi perilaku geng motor yang perlu ditumpas. Rupanya kepolisian lebih mementingkan cap dari pada isinya. Atau mungkin saja, semua yang berbusana geng motor berperilaku geng motor geng motor mudah dijumpai di setiap sudut

koua makassar. Tetapi karena mereka tak menyebut sebagai geng motor, kepolisian rappocini seperti mendapat alasan untuk membiarkan perilaku geng motor berkembang sejak kaki pengendara motor belum mampu menyentuh tanah. Padahal, kantor kepolisian di wilayah kota makassar tidak saja tersebar hingga ke setiap kecamatan berupa kantor-kantor polsek. Adapun penindakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah tindakan-tindakan dari pelaku geng motor di kota Makassar berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan ialah antara lain sebagai berikut :

“Saya melihat pihak ke polisian sudah bekerja semaksimal mungkin dalam mengatasi masalah dari peng motor di tiap-tiap wilayah” (hasil wawancara antara peneliti dan informan dalam hal ini Dinsos AR pada tanggal 12 november 2015).

“Penindakan dari pihak kepolisian sudah seharusnya diterapkan dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat” (hasil wawancara antara Peneliti dan informan sekretaris lurah gunung sari dalam hal ini bapak AW pada tanggal 12 november 2015).

1. Patroli dengan Rutin

Pihak kepolisian Kota Makassar untuk menekan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah operasi Polres Kota Makassar adalah seringnya diadakan patroli siang hari dan malam hari untuk mencari anggota-anggota geng motor yang berkeliaran dan berkumpul di tempat, dan biasanya susah untuk mendapatkan lokasi berkumpulnya karena mereka biasa berpindah-pindah tempat. Selain itu pihak polisi juga melakukan razia motor-motor yang tidak memiliki surat-surat dan tas-tas sekolah yang dicurigai membawa senjata tajam.

2. Operasi Khusus

Operasi khusus maksudnya, operasi yang dilakukan pada malam tertentu yaitu malam minggu yang di mulai jam 12 malam sampai pagi. Operasi dilakuan malam minggu karena malam minggu waktu berkumpulnya anggota-anggota geng motor pada biasanya. Dari hasil wawancara penulis kepada Brigadir Sumistopo, malam minggu.

Biasanya kita mengadakan operasi khusus dan kita memanggil anggota kepolisian lainnya dan Polsek-Polsek di kota Makassar.

3. Operasi Berpindah-Pindah

Anggota kepolisian sector Makassar biasanya menjalankan operasinya dengan cara berpindah-pindah, karena anggota geng motor sadar akan bahwa jika berkumpul hanya pada satu tempat mereka dengan gampangnya akan ditangkap oleh pihak kepolisian, makanya anggota geng motor itu sendin sering berpindah tempat untuk melakukan kejahatan dan berkumpul.

4. Operasi Gabungan

Pihak Polres Makassar untuk menimalisir tindak kejahatan geng motor di kota Makassar adalah mengadakan operasi gabungan anatara anggoua kepolisian di kota Makassar, yang biasanya dipimpin langsung oleh Kapolsek masing-masing yang ikut serta dalam operasi gabungan.

5. Adanya Himbauan

Salah satu upaya mengurangi kejahatan geng motor di Makassar yang ditempuh oleh Polres Makassar adalah membuat himbauan-himbauan dengan cara membuat spanduk atau baliho yang berisi tentang bahayanya kejahatan geng

motor dan himbauan kepada masyarakat luas remaja-remaja Makassar agar tidak ikut dan bergabung dalam perkumpulan geng motor tersebut.

6. Saling Koordinasi dengan Masyarakat

Selain mengadakan operasi langsung atau membuat himbauan publikasi kepada masyarakat dan pihak polisi juga berkoordinasi dengan masyarakat luas ketua RT/RW atau tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap sebagai petua di wilayah masing-masing. Maksud dari saling berkoordinasi adalah pihak kepolisian tentunya sering saling berkoordinasi dengan masyarakat tentang keberadaan anggota geng motor dan jika melihat langsung tindak kejahatan yang dilakukan harap untuk melapor langsung ke kantor polisi agar pihak kepolisian langsung menindak lanjuti tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

7. Memberikan penyuluhan

Penyuluhan juga sangat penting bagi memerangi kejahatan geng motor yang ada di kota Makassar. Pihak kepolisian tepatnya kapolsek biasanya memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah pada saat upacara bendera di hari Senin, karena kejahatan geng motor yang marak terjadi di Kota Makassar sebagian besar pelakunya atau geng motor tersebut adalah remaja-remaja yang masih dalam tahap pendidikan atau remaja yang menganggur. Jadi tempat untuk melakukan penyuluhan yang tepat adalah sekolah-sekolah yang ada dikawasan kota Makassar. Baik SMP atau SMA dan kampus kampus di Makassar. Adapun sekolah yang sering di adakan penyuluhan adalah SMA 22 Makassar, SMA 7 Makassar, SMA BPI, SMK 2, dan masih banyak sekolah-sekolah yang dijadikan arget penyuluhan.

Selain dari pihak kepolisian adapun saran atau solusi dari masyarakat setempat Kota Makassar, dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat berpendapat dan memberikan saran atau solusi kepada pihak kepolisian untuk upaya-upaya memberantas kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah :

1. Seharusnya sering diadakan razia malam dan razia siang dengan secara berkala.
2. Perlu ada tindakan tegas dan nyata untuk geng motor yang melakukan seperti pemberian hukuman yang betul-betul berat.
3. Kejahatan geng motor bisa diatasi apabila dari pihak kepolisian membangun pos-pos penjagaan di sejumlah titik rawan kejahatan yang ada di wilayah Kota Makassar.
4. Pihak kepolisian sebaiknya melakukan pendataan geng motor melalui anggota geng motor yang sudah ditangkap, dengan cara menenyan tempat-tempat yang sering di datangi oleh geng motor.

Maka dengan itu berdasarkan uraian diatas maka penelitin dapat melakukan awawancara sebagai berikut:

"saya selaku korban sangat mendukung apa yang telah dipaparkan oleh masyarakat lokal" (hasil wawancara antara para peneliti dari imforman (korban) dalam hal ini AT Pada tanggal 12 november 2015).

“Dan seperti aturan-aturan dalam menindak lanjuti untuk mencegah maraknya dari pelaku geng motor "(hasil wawancara antara para peneliti dan imforman dalam hal ini lurah gunung sari YN pada tanggal 12 november 2015).

Dengan demikian, adanya usaha-usaha penanggulangan yang seperti diatas baik itu yang dilakukan kepolisian setempat maupun solusi dan saran masyarakat untuk kepolisian dapat menekan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Tapi, intinya yang paling menentukan adalah masing-masing individu, dengan kesadaran suatu saat dapat menggugah anggota-anggota geng motor untuk menjauhi kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dengan sendirinya kesadaran hukum masyarakat meningkat.

Menurut Prodjodikoro (1980 : 70) bahwa maksud pasal 351 KUHP, menurut pembentuk undang-undang dapat dilihat dalam sejarah terbentuknya jahatan itu memang masuk dalam golongan kejahatan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan / upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (social defence policy).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penaggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (peral policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana di concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu, berupa sosial welfare dan sosial defence. Sebagaimana hasil wawancara antara peneliti dan

informan dilapangan dengan DINSOS kota Makassar sekaitan dengan masalah penindakan adalah sebagai berikut :

“Didalam penindakan ini sangat dibutuhkan terbangunya kerja sama antara pihak pemerintah, polsek maupun warga setempat dalam mengatasi maraknya aksi kriminal sebagai geng motor di tiap-tiap daerah” (hasil wawancara antara peneliti dan imforman dalam hal ini bapak AR pada tanggal 12 november 2015).

Ada tiga bagian pokok penanggulangan kejahatan secara empirik, yaitu :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini udalah upaya persiapan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah teradinya tindak pidana Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahaun secara pra- emtif adalah menanamkan nilai-nilai moral/norma-norma yang baik schingga noma-noma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tdak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terada kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niai menjadi hilang meskipun ada kesempatan, cara pencegahan ini berasal dari teori NKK yaitu, Niat ditambah kesempatanterjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saar lampu merah lalu lintas menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya adalah ada orang yang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat sudah terjadi tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkannya hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan kapolsek Rappocini terkait dengan upaya investigasi / penindakan terhadap aksi kriminalitas geng motor adalah sebagai berikut :

"Sebenarnya kami dari aparat ke polisian kapolsek rappocini sudah melakukan sosialisasi dari berbagai aturan sebagai bentuk tindakan dalam mencegah aksi kriminalitas geng motor, hanya saja terkadang aturan tersebut biasanya tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan bersama, buktinya semakin hari aksi kriminalitas geng motor semakin menjadi-jadi. " (hasil wawancara antara para peneliti dan aparat ke polisian kapolsek rappocini bersama bapak WH Pada tanggal 12 november 2015)

"Saya selaku kamtimnas kelurahan gunung sari akan selalu memperhatikan daerah tersebut agar tidak terjadi dampak aksi geng motor" (hasil wawancara antara para peneliti dan informan dalam hal ini bapak TR Kamtimnas pada tanggal 12 november 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hasil wawancara antara peneliti dan informan dengan adanya penindakan yang dilakukan oleh pihak ke polisian nampaknya aksi geng motor dapat di bendung secara perlahan-lahan.

2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah dan adapun pemerintah kota Makassar yang berperan untuk memberikan fasilitas juga merupakan tindak kriminalitas gang motor yang di lakukan oleh sebahagian anak di bawah umur di masyarakat kota Makassar salah satu menjadi program utama pemerintah kota dalam pengendalian maraknya geng motor pada setiap wilayah yang rawan menjadi tindak.

a. Pengadaan Fasilitas

1. Membuat arena kejuaraan balap motor secara resmi setiap tahun dan adapun fasilitas pemerintah ini telah bekerjasama dengan berbagai pihak sponsor baik dari pemerintah propinsi maupun pusat bahkan dari pihak swasta telah bekerja sama mendorong kejuaraan ini sebagai ajang untuk mencari bakat putra daerah yang nantinya di ikut sertakan dalam kejuaraan Nasional dan momentum inilah yang membuat pelajar atau pemuda semakin terarah dan termotifasih dalam berlatih dan tidak lagi terlibat dalam pergaulan-

pergaulan yang negatif yang dimana kita ketahui bahwa sebagian pemuda sering melakukan balapan-balapan liar di jalan raya yang tak sewajarnya dan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya maka disinilah peran pemerintah untuk menjembatani atau memberi fasilitas bagi pemuda agar tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dengan melukai apalagi sampai merenggut nyawa orang lain.

2. Pengadaan motor balap sebagai ajang persiapan pada setiap perlombaan yang diselenggarakan secara formal baik dalam kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional sehingga dapat memudahkan terlaksananya bagi mereka yang tidak mampu ikut serta dalam perlombaan agar bisa ikut serta dalam kejuaraan yang di selenggarakan oleh pihak pemerintah.
3. Pengadaan fasilitas Grub Band ini dapat membantu pemerintah dalam menimalisir remaja yang mempunyai bakat di musik dan dapat memberikan ruang yang baik untuk remaja agar terhindar dari aktivitas yang cenderung pada tindakan kriminal kama pada awalnya remaja itu terpengaruh dari lingkungan tempat mereka bergaul dan membutuhkan hiburan bagi mereka agar tidak jenuh dan dapat menghibur dirinya.

“ Adapun pasilitas ini yang akan di laksanakan oleh pihak pemerintah agar dapat menimalisir dari sebagian pemuda sehingga tidak terjerumus lagi pada tindakan prilaku kriminal geng motor atau begal yang dia lakukan lagi” (Hasil wawancara antara peneliti dan informan pada tanggal 13 november 2015 Bapak AR. staf DINSOS).

“Dengan demikian memang kiranya penting bagi pemerintah kota Makassar dalam menyiapkan fasilitas bagi remaja agar terhindar dari pergaulan-pergaulan negatif” (hasil wawancaranya antara peneliti dan informan dalam hal ini kepala kesbang RP pada tanggal 13 november 2015).

Kembali pada beberapa program yang dilayangkan oleh pemerintah kepada mereka para pelaku, atau dalam hal ini banyak diperankan oleh Dinas sosial. Banyak diantara pelaku yang sama sekali tidak mampu untuk menjauhkan dari sikap lamanya. Keonaran dalam masyarakat kembali terjadi. Itupun diakui oleh para beberapa petinggi masyarakat yang menganggap program rehabilitasi anak/remaja nakal tidak seperti dengan apa yang dilakukan dinas lain yang bekerja pada pembangunan fisik. Untuk masalah sosial kadang ada diantara mereka yang justru kembali pada pola hidup yang dianggap tidak wajar oleh pemerintah ini.

Pemerintah kemudian terjebak pada program seremonial seperti seminar atau bentuk acara pelatihan lainnya. Padahal aksi kriminalitas geng motor ini ternyata bermula pada pengaruh lingkungan yang sedang sosiologis. psikologinya pelaku tindak kejahatan ini dibangun dari lingkungan tersebut. Lalu pemerintah, setidaknya membuat program yang bisa meminimalisir tingkat depresi masyarakat terhadap lingkungannya.

“Selaku pemerintah kelurahan kiranya penting untuk mendorong pemerintah kota dalam mempersiapkan wahana / fasilitas untuk mengatasi maraknya aktivitas kriminal yang sering di lakukan oleh kelompok geng-geng motor” (hasil wawancara antara peneliti dan informan dalam hal ini bapak lurah gunung sari YN Pada Tanggal 13 November 2015).

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penting kiranya bagi pemerintah kota Makassar dalam menyiapkan fasilitas dalam mengatasi kriminalitas yang sering dilakukan oleh kelompok para geng-geng motor di Makassar.

“Dengan disediakannya fasilitas oleh pemerintah maka kami dari pihak dinas sangat berperan aktif untuk mendukung fasilitas yang dipersiapkan oleh pemerintah” (hasil wawancara antara peneliti dan informan dalam hal ini bapak staf dinas dalam hal ini AD pada tanggal 13 November 2015).

Dan hasil wawancara ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan disediakannya berupa fasilitas oleh pemerintah kota Makassar hal tersebut bisa mengurangi aktivitas geng motor

A. Pelatihan

Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja. (Simamora 2006 : 273). Menurut pasal I ayat 9 undang-undang No.13 Tahun 2003. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu yang dimiliki. Dan adapun tujuan diselenggarakannya pelatihan di sektor Fasilitas oleh pemerintah di kota Makassar adalah sebagai berikut diantaranya ialah :

Menyiapkan ruang karantina sebagai ajang aktualisasi dalam membuat pemuda untuk mengasah kemampuan dan keterampilan mereka agar semakin Profesional di bidang keahlian masing-masing yang dimilikinya sehingga di kemudian hari para pemuda ini dapat bekerja dengan baik. Membuat pemuda akan semakin disiplin dari segenap skill dan kemampuan yang bersifat Konstruktif.

Adapun hasil wawancara antara peneliti dan informan dalam hal ini Bapak MH. Sekaitan dengan Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Mencegah Aksi Kriminalitas Geng Motor Di Sektor Pelatihan adalah sebagai berikut :

"Sehubungan dengan maraknya, aksi kriminalitas yang di pelopori sebagian anak mudah di kota Makassar maka tentunya kami dari pemerintah setempat harus punya peran positif dalam melihat kejadian-kejadian tersebut maka kami akan adakan perekrutan para pemuda yang sering terlibat dalam aksi kriminalitas dengan tujuan pemberian bahan konseling dan fasilitas agar kiranya, skill dan kemampuan mereka dapat di pergunakan dengan baik sesuai dengan bidang masing-masing" (Hasil wawancara antara peneliti dan informan pada tanggal 13 november 2015 Ba MHL staf Dinsos).

"Saya pikir dengan adanya pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah maka ini bisa dengan mudah mengubah aktivitas bagi kelompok-kelompok geng motor yang dulunya kriminal bisa menjadi kreatif " (hasil wawancara antara para peneliti dan imforman dalam hal bapak kesbang RP pada tanggal 13 november 2015).

Dari beberapa uraian tersebut peneliti dapat kembali melakukan wawancara bersama dengan informan dalam hal ini bapak lurah gunung sari:

"Semoga dengan adanya pelatihan anak remaja dari geng motor ini agar kiranya bisa dibina dengan baik" (hasil wawancara antara para peneliti dan informan dan informan dalam hal ini bapak lurah gunung sari YN pada tanggal 13 november 2015).

"Dengan adanya pelatihan tersebut kami sebagai pelaku dapat bisa lebih kreatif tanpa lagi dengan aksi geng motor" (hasil wawancara antara para peneliti dan informan (pelaku geng motor) KK pada tanggal 13 november 2015).

Maka dari itu peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara di lapangan bahwa dengan adanya pelatihan tersebut anak remaja dari geng motor ini dapat dibina dan diberi keahlian berdasarkan pada kemampuan dan skill masing-masing agar kiranya tidak terjerumus lagi pada aktivitas geng motor.

3. Peran Pemerintah Selaku Motivator

Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian dari memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan (training), namun bisa juga melalui mentoring, coaching atau counseling. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di entri motivator disebutkan memiliki arti : orang (perangsang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melakukan sesuatu pendorong penggerak.

Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasnya masalah yang dihadapi. Berdasarkan fakta di lapangan peneliti dan informan dalam hal ini staf DINSOS dapat melakukan wawancara sebagai berikut :

“ Kami selaku bagian dan pemerintah kota Makassar menghimbau atau memberikan pengarahan pada seluruh pemuda yang ada di kota Makassar terkait dengan para anggota geng motor agar kiranya dapat merubah perilakunya dan cara berfikirnya yang bersifat positif” (hasil wawancaranya antara peneliti dan dalam hal ini staf dinsos AR pada tanggal 13 november 2015).

“ Maka dari itu dengan adanya pemberian konseling kita sangat berharap bisa merubah para remaja agar terhindar dari hal-hal negative” (hasil wawancara antara peneliti dan informan dalam hal ini bapak staf kesbang TG pada tanggal 13 november 2005).

Demikianlah hasil wawancara antara peneliti dan informan dalam hal ini Hubungan Masyarakat (HUMAS) sekalian dengan sudah pudarnya rasa siri' nach pacce' Terkat mengenai siri' yang oleh banyak pihak menganggap telah melenceng dan dasamya. Kini dalam beberapa hal pada perwujudan lebih sering menjurus pada arah yang negatif. Ini bisa tenadi bila penafsiran terhadap sebuah konsep kebudayaan telah dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak dapat melestarikan nila asli sebuah kebudayaan.

Menurut penulis, siri' bergeser di masyarakat Makassar karena adanya ruang masyarakat yang tidak lagi terbangun dari nilal budaya itu sendiri. Seperti yang diketahui perilaku masyarakat urban sebagai kota yang mulai merias diri menuju kota dunia tentunya akan terbawa arus modernisasi yang sangat jauh dari perilaku kebudayaan asli Makassar.

Bertolak dan hakekai siri ', maka siri' seyonganya merupakan panduan jiru bila itu berhasil dikembangkan bagi masyarakat yang terlembagakan dengan tatanan nilai budaya ini. Siri' yang pada pokoknya bersumber dan nilai ikatan

masyarakat Makassar bisa dijadikan sebagai bahan ajaran untuk mentaati hukum, peraturan, perjanjian dan bentuk ikatan lain demi penciptaan di dalamnya tanpa persinggungan antara satu sama lain.

Siri' pun bisa dijadikan sebagai alat untuk mendorong masyarakat meningkatkan potensi kelompok dengan kemampuan yang dimiliki. Bila siri' berhasil untuk "dikuasai" maka motivasi akan timbul sendiri dalam perseteruan antar kelompok tapi tentukan pada tiap-tiap kelompok tersebut hidup berkelompok dengan pandangan siri' merupakan perwujudan sebuah lembaga positif dalam masyarakat Sulawesi selatan yang didasarkan pada kemampuan dan dengan sendirinya martabat akan terangkat.

Bagi masyarakat Makassar rasa solidaritas sangat mungkin terbangun dengan peta siri' yang dimiliki. Bila solidaritas tersebut terbangun maka kesatuan Makassar akan terwujud sehingga tidak ada lagi perpecahan yang timbul di kota ini. Siri' bagi masyarakat di kota ini telah dianggap sebagai salah satu nilai yang patut untuk dipegang erat.

Dibalik semua potensi dari siri' maka ada pula potensi yang miris yang masih mungkin terjadi lagi. Siri' yang kini telah banyak diselewengkan dalam pribadi sehingga konstruksi tatanan sosial yang timpang ini membuat harkat siri' meninggalkan aspek kebudayaan niainya yang luhur.

“ Orang-orang yang tidak memiliki rasa siri' kenapa begitu mereka itu contohnya itu membawa ego dan tidak merasa malu sama bila melakukan tindakan kejahatan.

Anggapan dari Toko Pemuka Masyarakat kemudian berujar tentang fenomena siri ‘ yang disalah gunakan. Menurutnya dalam kitab lontara ‘ dan kisah kepahlawanan daerah yang lain sama sekali tidak ada ajaran yang menganjurkan kita untuk saling berseteru. Melainkan siri’ itu bermakna untuk malu berbuat untuk saling menyakiti satu sama lain, singkatnya siri’ menurutnya telah disalah kaprahkan.

Terlepas dari peran para pendatang yang membawa ego kedaerahan kota juga menciptakan kemajemukan dalam berbagai kategori seperti kelompok hobby maupun ikatan persatuan dengan tujuan beragam.

Pada awalnya kemajemukan tersebut sangatlah berguna untuk memperkaya khasanah kebudayaan dan pencapaian tujuan yang tidak bisa diperoleh secara personal. Namun lambat laun perselisihan terjadi akibat adanya kepentingan yang sama dan sangat sedikit ketersediaannya. Intinya kepadatan penduduk pada suatu wilayah.

Dalam ketidak berdayaan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang akan berfikir untuk menggunakan cara apapun. Bila kesempatan dengan jalur yang telah disediakan telah tertutup maka seseorang tidak akan segan untuk membuka jalur pemenuhan kebutuhan yang lain. Kemiskinan merupakan faktor yang memicu tingkat kekerasan dalam masyarakat dan bila kondisi itu terjadi bersama maka tingkat kekerasan kelompok akan terbentuk dengan sendirinya.

Tingkat kekerabatan kaum terpinggirkan akan sangat gampang terbentuk dan menjadi sebuah ikatan solidaritas bila dibandingkan dengan mereka pemilik ekonomi mapan karena dengan cukup mengandalkan kemampuan pribadi dari

kekayaannya, seorang kaya sudah bisa membeli apapun. Ketimbang kau terpinggir yakni mereka para miskin kota akan sangat gampang baik memobilisasi diri sendiri maupun dimobilisasi oleh kelompok tertentu.

"Ketika kondisi sosial sangat labil maka potensi kejahatan gampang terbentuk, ketidakadilan atau kemiskinan juga itu menjadi potensi besar kejahatan bisa terjadi" (hasil wawancara antara peneliti dan informan pada tanggal 13 november 2015 LY korban).

"Untuk anak-anak remaja berperilakulah yang baik dan jangan lagi terjerumus pada hal-hal yang berbaur dengan kegiatan-kegiatan geng motor yang serin meresahkan masyarakat" (hasil wawancara antara peneliti dan informan dalam hal ini bapak KAMBTIMNAS TR pada tanggal 13 november 2015).

Ungkapan diatas merupakan hasil observasi yang telah dilakukan setelah mencocokkan data dari bagian informan baik dari masyarakat Makassar maupun dari masyarakat setempat tentang posisi dari mereka.

Kelompok yang lain pun demikian. Terciptanya beragam kelompok tidak bisa dilepaskan dari pembentuk ikatan kelompok yang juga berbeda. Ada yang berdasarkan batas teritorial, ada yang berdasarkan kesamaan suku, kebiasaan hidup hingga kegemaran yang dimiliki oleh tiap individu. Persinggungan antar kelompok terjadi dengan tingginya eksklusivisme kelompok yang terbangun, lahirlah tiap individu dalam kelompok tentunya akan menjunjung tinggi kelompoknya dibanding kelompok lain. Itu terjadi karena hanya kelompoklah yang bisa dijadikan bahan untuk menunjukkan identitas pribadi yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mampu dalam segi ekonomi, memiliki kuasa dan instrumen lain yang bisa menonjolkan diri.

Aksi kriminalitas geng motor ini dalam narasi diatas mengenai terbentuknya memiliki beragam akar persoalan. Ada yang disebabkan karena persoalan ekonomi, minuman keras, obat-obatan, hingga ikut-ikutan yang memborok dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun dalam penelitian ini penulis menemukan fakta dari kecamatan ini dengan tingkat aksi kriminalitas geng motor ini tertinggi bahwa kemiskinan merupakan embrio tindakan kriminal. Berikut ini pernyataan beberapa informan yang membenarkan kesimpulan tersebut.

“Kesiapan Materi juga berpengaruh. Kriminalisasi terjadi karena tuntutan ekonomi uang tidak bisa dipenuhi” (Hasil wawancara dengan peneliti dan informan pada tanggal 13 november 2015 DL pelaku geng motor kota Makassar).

“Ketidakadilan dan kemiskinan menjadi potensi besar kami melakukan tindakan itu” (Hasil wawancara para peneliti dan informan pada tanggal 13 november 2015 KC pelaku geng motor kota makassar.)

Salah satu hal yang terjadi suatu aksi yang di lancarkan geng motor ini yang didasarkan pada penjunjungan martabat atau siri ‘ dalam masyarakat Makassar, bila pemerintah kota tidak segera melakukan tindakan dalam pencegahan aksi geng motor ini dan bertindak memperbaiki konsep siri’ yang mulai bergeser dari landasan budayanya. Maka jangan heran masyarakat akan bertindak sendiri sesuai pemahaman budaya mereka yang masih sangat sempit. Adapun hasil wawancara antara peneliti dan imforman adalah sebagai berikut:

“Dengan adanya pemberian konseling kami dari aparat ke polisian sangat berharap agar kiranya bisa mengubah pola pikir anak remaja sekarang ini, sehingga tidak terjadi lagi dari aksi brutal yang bisa membahayakan masyarakat” (hasil wawancara antara para peneliti dan imforman dalam hal ini reskrim TS pada tanggal 13 november 2015).

Demikianlah dari hasil wawancara ini penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pemberian konseling yang diberikan oleh remaja dari geng motor agar kiranya dapat merubah pola pikir dan tingka laku untuk menjadi yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. peran pemerintah sebagai regulator yang dalam skripsi ini adalah penegakan aturan hukum yang berhubungan dengan aktivitas geng motor.
 - a. Sosialisasi aturan adalah menyampaikan kepada publik aturan hukum yang menyangkut dengan aktivitas geng motor.
 - b. Penindakan adanya tindakan hukum yang dikenakan terhadap aktivitas geng motor.
2. Peran pemerintah sebagai fasilitator yang dalam skripsi ini adalah peran pemerintah untuk mengadakan berbagai fasilitas sehingga dapat mengurangi aktivitas dari geng motor.
3. Peran pemerintah sebagai motivator adalah memberikan pembimbing atau arahan untuk tidak melakukan atau menghindari aktivitas dari geng motor.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan maka peneliti menyarankan bahwa pemerintah setempat serta institusi terkait lainnya tentunya juga memiliki peran penting dan bagian yang berbeda-beda seperti aparat keamanan dalam melaksanakan peran dan pemerintah kota makassar pun demikian, dalam melaksanakan perannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan penduduk sari kerusakan. Penodongan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Althusser, Louis. *Tentang Ideologi (Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies)*. Terjemahan *Essay On Ideology 2003* Jalasutra. Yogyakarta.

Dom Helder. *Spiral Kekuasaan*. Resist Book. Yogyakarta. 2005

Froom, Akbar *Kekerasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Jacques, Jean Rousseau, *Kontrak Sosial, Terjemahan Sumarjo*, Erlangga, Jakarta. 1986

----- . Kamus Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD, 1996

Kartini, Kartono. *Kenakalan Remaja (Patologi Sosial 2)*. Rajawali Press. Jakarta. 2010

Kencana, Inu. *Ilmu Politik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2002

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Lawang, Robert M Z. *Pengantar Sosiologi*, PT. Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 2003

Lwxy, J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000)

----- . Makassar Dalam Angka 2014

Ndraha, Talidziduhu. *Kybernology 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Penerbit Rineka Cipta. 2008

----- . Petunjuk Teknisi Penanganan Masalah Sosial Anak Nakal, DEPSOS RI, 1997

Prodjodikoro, 1990 : *70 Sejarah Terbentuknya Kejahatan* (Jakarta)

Rasyid, Ryas. *Makna Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*,
PT. Yarsif Watampone

Ritzer dan Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana. Jakarta. 2010

Sabari, Yunus. *Manajemen Kota*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008

Soekanto, Soerjono, *Memperkenalkan Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Parsada,
Jakarta, 2007

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Parsada,
Jakarta, 2009

Suharto, Edy. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ;* Refika
Aditama. Bandung 2009

Sukriansyah S. Latif dan Tomi Lebang, *Amuk Makassar*, Institute Studi Arus
Informasi, Makassar, 2009

Sunardi, *Keselamatan Kapitalisme dan kekerasan*, LKIS, Yogyakarta, 2009

Suryaningrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
2003

Tadie, Jerome. *Wilayah Kekerasan Jakarta*. Masup. Jakarta. 2009

UU NO.13 *Pasal 1 ayat 9 tahun 2003 Pelatihan Kerja*

Wahid, Sugira. *Manusia Makassar*

Artikel/Jurnal

Budi Hardiman, Memahami Akar-Akar Kejahatan Geng Motor, 28 Oktober 2015

----- . Warta Titian Damai, Februari 2009

Situs

Situs Resmi Pemerintah Kota Makassar

Situs Resmi POLRI

Peraturan/Perundang-Undangan

KEPMENSOS Nomor 25/Huk/2003\

Perda No. 3 Tahun 2009 Kota Makassar Tentang Kantor KESBANG

Perda Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemrintah Daerah.